



PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

III.38

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

**PROYEK PENGEMBANGAN MEDIA KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
JAKARTA 1994/1995**

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
II. LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3
A. Landasan Rasional	3
B. Landasan Yuridis	3
III. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	5
A. Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	5
B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan	5
IV. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN ...	13
(1) Memelihara dan Melindungi	14
(2) Menggali dan Meneliti	16
(3) Mengembangkan dan Memperkaya ...	16
(4) Menyebarluaskan	17
(5) Memanfaatkan	17
(6) Menanggulangi Pengaruh Asing yang Negatif	19
(7) Kerja Sama	19
V. KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DALAM PJP II	21
1. Tantangan	21
2. Kendala	24
3. Peluang	25
VI. PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM REPELITA VI	33
1. Program Pokok	33
2. Program Penunjang	38
VII. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA VI	41

LAMPIRAN

a. Rencana Anggaran Pembangunan	42
b. Struktur Organisasi	43

PENGANTAR

Memasuki era tinggal landas yang akan terjadi pada PJP II, budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya bangsa Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan Nusantara, harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial dan disiplin serta semangat pantang menyerah.

Upaya-upaya tersebut adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun swasta. Booklet ini berisi kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam upaya membina dan mengembangkan kebudayaan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi pemandu, perangsang dan penggugah kita semua warga negara Republik Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam upaya memajukan kebudayaan nasional seperti yang diamanatkan dalam UUD 45 Pasal 32 beserta penjelasannya.

Semoga buku ini bermanfaat.



Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Edi Sedyawati

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan pada hakikatnya adalah perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti yang luas. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan pola bagi tingkah laku yang nyata maupun yang tidak nyata dan diperoleh serta diwariskan melalui proses belajar dengan menggunakan lambang-lambang.

Pengertian kebudayaan mencakup benda dan peralatan karya manusia, sedangkan inti kebudayaan itu sendiri terdiri dari gagasan-gagasan dan nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman para pendukungnya, yang selanjutnya menguasai sikap dan tingkah laku pendukungnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan jasmani dan rohani manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara aktif, maka peralatan yang dikembangkan manusia sebagai unsur kebudayaan material yang nyata, sangat besar artinya dalam mempermudah serta memperingan kehidupannya. Walaupun demikian unsur kebudayaan materi semata tidak banyak artinya tanpa dilandasi pengetahuan yang menyangkut cara pembuatannya, pengolahannya dan penggunaannya. Pengetahuan lain yang menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku sosial seperti nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan pandangan hidup yang dimiliki manusia juga selalu digunakan dalam menghadapi lingkungannya.

Pemikiran-pemikiran tersebut di atas menjadikan kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan yang memberi makna dan arah kehidupan sosial serta sebagai mekanisme pengendali dalam membina pergaulan sosial dalam proses penyesuaian diri secara aktif dengan lingkungannya, mengubah dan menciptakan lingkungan baru yang lebih serasi dengan tuntutan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan budaya yang timbul kemudian.

II. LANDASAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.

A. Landasan Rasional

Kalau kebudayaan suku bangsa dan daerah berlaku dalam kelompok sosial terwujud karena hubungan kekerabatan serta kelompok-kelompok sosial yang mendiami suatu kesatuan wilayah tertentu, kebudayaan nasional berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan perekat yang bersifat nasional dan yang melintas suku bangsa maupun daerah.

Kekuatan kebudayaan nasional sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain disebabkan adanya kenyataan bahwa kebudayaan nasional mempunyai kekuatan-kekuatan sebagai berikut.

- (1) dapat memberi makna dan arah kehidupan serta cita-cita bangsa;
- (2) merupakan kerangka acuan bagi sikap dan tingkah laku sosial dalam pergaulan antara sesama warga negara; dan
- (3) merupakan jati diri bangsa yang menumbuhkan rasa bangga dan mengikat segenap penduduknya.

B. Landasan Yuridis

Kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (1) Pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", beserta penjelasannya.
- (2) Pasal 36 UUD 1945, yang menyatakan bahwa :
"Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia", beserta penjelasannya.

- (3) Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ayat (2), menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu", beserta penjelasannya.

Pengertian tentang "kepercayaannya itu", sebagaimana tersebut pada Ayat (2) di atas diartikan sebagai Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No.II, tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993. Dalam hal pembinaan selanjutnya, masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1978 dan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1978, menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan.
- (5) Undang-Undang No.5 tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No.5 tahun 1992.

III. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

A. Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 4 Unit Utama Teknis, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (DITJEN DIKDASMEN)
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DITJEN DIKTI)
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga (DITJEN DIKLUSEPORA), dan
4. Direktorat Jenderal Kebudayaan (DITJENBUD)

Di samping itu, ada 3 Unit Utama Penunjang, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal (SETJEN DEPDIKBUD)
2. Inspektorat Jenderal (ITJEN DEPDIKBUD), dan
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BALITBANGDIKBUD).

Selanjutnya di tingkat provinsi terdapat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (KANWIL DEPDIKBUD), di tingkat Kabupaten/Kotamadia terdapat Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kotamadia (KANDEP DEPDIKBUD KAB/KODIA) serta di tingkat Kecamatan terdapat Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan (KANDEP DIKBUDCAM)

B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

1. Sejarah Singkat.

Sebelum penjajah masuk ke Indonesia, di wilayah Nusantara telah berdiri beberapa pemerintahan kerajaan, yang pada hakikatnya merupakan sebuah

organisasi pemerintahan dengan sistem administrasi negara kerajaan. Pada saat itu, di samping kraton sebagai pusat pemerintahan juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Adanya berbagai jabatan seperti: juru sungging, juru sastra, juru pangrawit, juru keris dan lain sebagainya, membuktikan bahwa kebudayaan telah menjadi sasaran dalam pengelolaan kerajaan.

Pada masa penjajahan (Potugis, Belanda, Inggris, dan Jepang) pengelolaan kebudayaan berada di tangan raja yang berkuasa dan di tangan penjajah dalam rangka menanamkan dan mempertahankan kekuasaannya. Pembinaan kebudayaan yang dilakukan penjajah diarahkan untuk menanamkan kebudayaan yang mereka bawa, sementara kebudayaan asli dipaksa untuk menyesuaikan dengan kebudayaan yang mereka bawa.

Sebelum merdeka terdapat badan yang bergerak di bidang kebudayaan seperti: Oudheidkundige Dienst, Koninklijk Bataviasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen, yang kesemuanya adalah organisasi yang mengelola kebudayaan untuk kepentingan penjajah. Organisasi seperti Taman Siswa, Boedi Oetomo dan sebagainya, pada hakikatnya merupakan bukti sebagai reaksi terhadap sistem administrasi penjajah dalam membina dan mengembangkan kebudayaan pada waktu itu.

Pada masa penjajahan Jepang telah berdiri Keimin Bunka Shidoso (Pusat Kebudayaan) yang secara tidak langsung merupakan wadah organisasi yang melayani administrasi kebudayaan yang bertujuan memajukan mutu seni dan kebudayaan serta mengarah pada pembentukan identitas budaya Indonesia.

Pada masa kemerdekaan, upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui sistem administrasi dimulai dengan berdirinya BAGIAN KEBUDAYAAN pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yaitu berdasarkan

Keputusan Menteri PP dan K nomor: 203, tanggal 11 September 1946. Upaya yang dilakukan adalah kadervorming (= pembentukan kader) dengan jalan kursus pegawai.

Perkembangan selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Tahun 1948, Bagian Kebudayaan diganti menjadi BAGIAN D, berdasarkan Keputusan Menteri PP & K, nomor: 35571 D, tanggal 24 April 1948. Tugas dan fungsinya adalah mempertinggi dan memelihara derajat kebudayaan umum dan kesenian bangsa Indonesia, memberikan pimpinan, bantuan, bimbingan pada masyarakat dalam bidang kebudayaan dengan falsafah, "Ing Ngarso Asung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani".
- b. Tahun 1949, dibentuk JAWATAN KEBUDAYAAN dengan keputusan Menteri PP & K nomor 57/5 tanggal 5 Agustus 1949, menggantikan Bagian D. Tugas dan fungsinya adalah mengurus dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan, baik yang kuno maupun yang baru.
- c. Tahun 1964, Jawatan Kebudayaan diganti menjadi DIREKTORAT KEBUDAYAAN berdasarkan Keputusan Menteri PD & K No. 34/1964, tanggal 9 Mei 1964. Di samping itu, dibentuk pula lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Museum Pusat.
- d. Pada masa Kabinet Dwikora (1964-1966) Presiden menetapkan 3 orang Pembantu Menteri, salah satu di antaranya adalah PEMBANTU MENTERI BIDANG KEBUDAYAAN (Ibu Lasmidjah Hardi) yang bertugas membantu Menteri P dan K serta berfungsi sebagai koordinator atas tugas-tugas atau kebijaksanaan

Menteri dalam bidang kebudayaan serta mengkoordinasikan Direktorat dan lembaga-lembaga yang ada.

- e. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 170/1966 dan Keputusan Kabinet Ampera No. 175/Kep./11/1966, tanggal 3 November 1966, Departemen P dan K dibagi atas 4 Direktorat Jenderal, dan salah satu di antaranya adalah DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN. Sebagai pelaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kotamadia dibentuk Inspeksi Daerah Kebudayaan kemudian berubah lagi menjadi Kantor Daerah Direktorat Jenderal Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kotamadia.

2. *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan*

Pada tahun 1969, dengan Keputusan Presiden No. 39/1969 ditetapkan adanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 dan 35 tahun 1969, ditetapkan unit-unit organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
- b. Direktorat Kesenian
- c. Direktorat Pendidikan Kesenian
- d. Direktorat Museum
- e. Lembaga Bahasa Nasional
- f. Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional
- g. Lembaga Sejarah dan Antropologi
- h. Lembaga Musikologi dan Koreografi

Di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Perwakilan Departemen P dan K yang dibantu oleh Asisten Kebudayaan. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kotamadia oleh Kantor Pembinaan Kebudayaan dan Kantor Pendidikan Kesenian.

Selanjutnya pada tahun 1975, struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan berdasarkan

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 079/0/1975 tanggal 23 April 1975 diadakan penyempurnaan lagi menjadi:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
- b. Direktorat Pembinaan Kesenian
- c. Direktorat Pengembangan Kesenian
- d. Direktorat Museum
- e. Direktorat Sejarah dan Purbakala

Di samping itu Direktorat Jenderal Kebudayaan juga membina secara teknis:

- a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- b. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional
- c. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.

Di tingkat provinsi dibentuk Bidang Kesenian, dan Bidang Permuseuman, Sejarah dan Purbakala.

Di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibentuk masing-masing Kepala Seksi Kebudayaan dan Penilik Kebudayaan.

Pada tahun 1980, berdasarkan Kepmen. No. 0222/e/1980 susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan disempurnakan lagi, dan masih berlaku hingga sekarang. Susunan organisasinya terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (SETDITJENBUD)
- b. Direktorat Kesenian (DITNI)
- c. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (DITJARAHNITRA)
- d. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (DITLINBINJARA)
- e. Direktorat Permuseuman (DITMUS)
- f. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (DITBINYAT).

Di samping itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan secara teknis membina:

- a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (PUSBIN BANGSA)
- b. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSLIT ARKENAS)

Di samping itu juga didukung oleh 76 buah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : Museum Nasional 1 buah, Museum Negeri Propinsi 25 buah, Museum Khusus 4 buah, Taman Budaya 23 buah, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 9 buah, Balai Konservasi Borobudur 1 buah, Balai Penelitian Bahasa 3 buah, Balai Arkeologi 5 buah, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 6 buah, yang tersebar di seluruh propinsi.

Sedangkan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh (1) Bidang Kesenian, (2) Bidang Museum dan Kepurbakalaan, serta (3) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional. Di tingkat Kabupaten dan Kecamatan masing-masing dibantu oleh Kepala Seksi Kebudayaan dan Penilik Kebudayaan.

3. *Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan*

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/O/1980, tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah : "Menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan pembinaan, serta perizinan di bidang Kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh **Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

- b. Melaksanakan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, mengingat cakupan pengertian tentang kebudayaan sangat luas, maka sesuai Keputusan Menteri seperti tersebut di atas, bidang-bidang Kebudayaan yang dibina dan dikembangkan sebagai penjabaran tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup :

- (1) bidang Kesejarahan
- (2) bidang Nilai-Nilai Budaya
- (3) bidang Kesenian
- (4) bidang Peninggalan Sejarah dan Purbakala
- (5) bidang Permuseuman
- (6) bidang Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- (7) bidang Kebahasaan dan Kesastraan, serta
- (8) bidang Arkeologi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 32 UUD 1945 menyatakan bahwa : "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa : "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Rumusan ini menunjukkan bahwa kebudayaan nasional harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, berkembang terus dan dapat menuntun ke arah perkembangan sebagai peradaban. Upaya memajukan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam akan meningkatkan persatuan bangsa dan bukan sebaliknya akan membangun sikap kedaerahan yang sempit. Bangsa Indonesia harus bersikap terbuka tetapi juga selektif serta mampu mengadaptasikan bahan-bahan baru yang masuk dari kebudayaan lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya pasal 32 dan penjelasannya mengandung dua langkah kebijaksanaan yang mengarah pada dua sasaran yang berbeda. Arah pertama, agar pemerintah bersama-sama masyarakat berupaya memelihara dan melestarikan warisan budaya bangsa agar tidak punah, sedangkan arah sasaran kedua adalah memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Agar kedua arah tidak terus menerus bertolak belakang, maka kebijaksanaan untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945, adalah berupaya menciptakan iklim agar kedua arah langkah tersebut dapat terpadu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat "PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN".

Langkah yang bersifat Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan mempersiapkan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan yang tanggap, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman dengan upaya menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran, gagasan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan demikian masyarakat bukan hanya akan mengembangkan pola tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional yang sedang dikembangkan, akan tetapi juga menjadi pendukung kebudayaan yang aktif dan kreatif dalam memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsanya.

Sementara itu, langkah yang bersifat Pengembangan diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mempertinggi mutu kebudayaan bangsa, memperkaya nilai-nilai dan memperkuat identitas budaya bangsa sesuai dengan penjelasan pasal 32 UUD 1945, serta mengupayakan tersedianya berbagai fasilitas yang dapat mendukung upaya memajukan kebudayaan nasional.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan adalah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat :

- (1) memelihara dan melindungi
- (2) menggali dan meneliti
- (3) mengembangkan dan memperkaya
- (4) menyebarluaskan
- (5) memanfaatkan
- (6) menanggulangi pengaruh asing yang negatif
- (7) kerja sama

Penjelasan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

(1) Memelihara dan Melindungi

Upaya menanggulangi ancaman terhadap kelestarian warisan budaya, baik kebudayaan nonmateriil yang berupa nilai-nilai, norma sosial dan pandangan masyarakat, maupun kebudayaan material (benda seni dan benda cagar

budaya) agar kebudayaan itu tidak mengalami kerusakan, kehancuran, dan kepunahan.

Ancaman pada kebudayaan nonmaterial terjadi karena makin deras nya arus pengaruh yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan terjadinya pengeseran dan perubahan nilai-nilai, norma-norma sosial dan pandangan hidup masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: inventarisasi, perekaman, penulisan, penerjemahan, transkripsi, pengungkapan nilai-nilai budaya bangsa dan penanaman kepada generasi penerus.

Ancaman kerusakan pada warisan benda materiil atau benda cagar budaya disebabkan oleh proses alam, biologis maupun kimiawi sesuai hukum alam sehingga perlu diupayakan agar usia benda tersebut dapat diperpanjang. Ancaman yang paling berbahaya justru datang dari manusia. Berbagai kasus pelanggaran berupa: pengrusakan, penggalian liar, penggelapan, pengiriman ke luar negeri dan pencurian benda cagar budaya cenderung makin meningkat.

Upaya yang dilakukan adalah mengadakan pemeliharaan dan perawatan, konservasi, pembersihan, pemugaran, penyimpanan, dan perlindungan benda warisan budaya dari berbagai gangguan. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP Nomor 10 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1992.

Salah satu jalur yang efektif untuk memelihara dan melindungi kebudayaan di Indonesia, budaya materiil maupun nonmaterial, adalah melalui jalur pendidikan, karena pendidikan dipandang sebagai suatu proses untuk membudayakan manusia. Proses itu berjalan dengan mentransfer nilai-nilai budaya esensial yang ada, dan mentransformasikan menjadi nilai-nilai budaya kekinian, dari generasi ke generasi, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan, disamping berfungsi untuk

menjaga kesinambungan, juga mempunyai fungsi pelestarian, penyerapan dan pemanduan, pelestarian, dan persiapan masa depan.

Pendidikan berfungsi preparatif karena melalui pendidikan dilakukan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Pendidikan juga berfungsi penyerapan dan pepaduan, karena secara aktif meramu dan menggodok nilai-nilai budaya lama dengan nilai-nilai baru, sehingga terbentuk kebudayaan yang bersifat kekinian yang menjadi milik bangsa pada saat itu. Pendidikanpun berfungsi mempersiapkan kebudayaan masa depan. Fungsi yang terakhir ini dilakukan dengan jalan memperkenalkan nilai-nilai universal sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan komunikasi, sehingga kebudayaan nasional mampu mengantisipasi nilai-nilai yang mungkin muncul di masa mendatang.

(2) Menggali dan Meneliti

Kegiatan penggalian dapat mengandung dua macam pengertian. Pertama, menggali dalam artinya mengungkap, memilah-milah dan mengkaji warisan budaya nonmateriil yaitu tentang nilai-nilai, norma-norma sosial dan pandangan masyarakat guna ditawarkan dan di"pasar"kan dan selanjutnya ditanamkan pada generasi penerus. Arti yang kedua adalah menggali dalam arti mengadakan ekskavasi atau menggali situs untuk mencari dan menemukan benda cagar budaya untuk dapat diteliti, dikaji dan diungkap latar belakang sejarahnya, sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan sejarah dan pengembangan ilmu.

Kegiatan penggalian dan penelitian yang dilakukan antara lain, penelitian di lapangan, penelitian di perpustakaan, ekskavasi, analisis laboratorium, revitalisasi, rekonstruksi (seni) yang hampir punah, seminar, diskusi dan penerbitan.

(3) Mengembangkan dan Memperkaya

Dalam pertemuan budaya antar suku dan antar bangsa tanpa disadari terjadi proses saling mempengaruhi dan

saling mengambil alih antara satu dengan yang lain. Proses saling mempengaruhi ini akan dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan yang bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah diskusi, ceramah, sarasehan, bimbingan dan penyuluhan, pengiriman atau pertukaran kebudayaan, lomba, festival, pameran dan peragaan.

(4) Menyebarluaskan

Dalam rangka pembinaan apresiasi budaya dan mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan budaya, maka kekayaan budaya dan hasil penggalian dan penelitian kekayaan budaya perlu diperkenalkan dan disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan penybarluasan, hasil penggalian dan penelitian ditawarkan dan dipasarkan untuk selanjutnya diserap dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan mendorong tumbuhnya kesatuan bangsa dan memperkuat persatuan bangsa. Kegiatan yang dilakukan melalui berbagai media (TV, Radio, Surat Kabar/Majalah) antara lain berupa pembuatan rekaman film, video, gambar/foto, slide, penerbitan buku, pameran, pagelaran, ceramah, bimbingan dan penyuluhan.

(5) Memanfaatkan

Budaya Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah merupakan modal dasar dan faktor yang dominan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan nasional perlu dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan bagi kelangsungan kebudayaan bangsa, antara lain dengan memanfaatkan warisan budaya sebagai obyek pariwisata dan sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan dan kebudayaan sesungguhnya mempunyai kaitan kemanfaatan yang erat. Suksesnya pendidikan antara lain ditunjang oleh potensi kebudayaan bangsa, dan sebaliknya hidup dan majunya kebudayaan disebabkan oleh berhasilnya pendidikan. Untuk membentuk manusia

sadar budaya yang mampu memahami, menghayati dan mengembangkan kebudayaan nasional, pendidikan telah disenggarakan dalam suasana penuh kebebasan untuk memilih dan terbuka untuk menerima. Dengan demikian siswa akan mampu meneliti, mengkaji, mengapresiasi dan mengembangkan kebudayaan nasionalnya serta mampu mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan-kegiatan lomba, festival, sayembara, pelatihan dan pertunjukan, pameran berbagai cabang seni di berbagai jenjang sekolah sangat efektif guna dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran berbudaya, sehingga perlu diupayakan agar sekolah dapat menjadi pusat kegiatan kebudayaan.

Peran kurikulum dalam proses pembentukan manusia Indonesia yang berbudaya melalui pendidikan amat menentukan, baik kurikulum yang bersifat nasional maupun kurikulum muatan lokal. Unsur-unsur kebudayaan yang tertuang dalam mata pelajaran seperti : Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Sejarah Nasional dan Umum, Kerajinan Tangan dan Kesenian/Kebudayaan, pada hakekatnya merupakan upaya pemanfaatan kebudayaan dalam pembentukan jatidiri bangsa dan perekayasaan untuk kesinambungan dan pengembangan kebudayaan. Di samping itu, kebudayaan harus menjadi acuan para pendidik seperti diamanatkan UU No. 2 tahun 1989, pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa : *tenaga kependidikan harus bersikap menjunjung tinggi kebudayaan bangsa.*

Dengan demikian jelas bahwa pendidika dan kebudayaan tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, berbagai fasilitas kebudayaan yang berada di luar lingkungan pendidikan seperti : museum, taman budaya, pusat kesenian, sanggar seni, padepokan, perpustakaan, obyek peninggalan sejarah dan purbakala dan sebagainya perlu dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam arti sebagai manusia Indonesia yang berkualitas dan berbudaya Indonesia.

(6) Menanggulangi Pengaruh Asing yang Negatif

Masuknya pengaruh kebudayaan asing dapat terjadi dari berbagai arah, pada waktu dan di tempat manapun, baik terhadap kebudayaan materiil maupun nonmateriil. Sebagaimana dijelaskan di depan, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, serta keberhasilan pembangunan, kontak-kontak budaya tidak mungkin dihindari. Demikian gencarnya kontak tersebut, hampir-hampir kita tidak diberi kesempatan untuk memilih atau menolak mana yang cocok mana yang tidak. Kontak kebudayaan seolah-olah terjadi bersifat "terpaksa" daripada kontak yang bersifat manasuka.

Pancasila di samping sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh rakyat harus memahami, menghayati, mentaati dan mengamalkan perjanjian tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam perjalanan sejarahnya hingga kini, Pancasila telah terbukti keampuhannya dalam menyaring dan menangkal masuknya kebudayaan asing yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kelestarian kebudayaan bangsa. Lima sila yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari telah tumbuh sebagai norma yang mengatur dapat diterima atau tidaknya kebudayaan asing, antara lain dilihat dari norma hukum, kesopanan, kesusilaan, tatakrama, dan norma-norma lain yang bersumber pada Pancasila. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah upaya untuk :

- a. menanamkan keyakinan bahwa kita memiliki kepribadian dan kedaulatan budaya sendiri.
- b. menanamkan sikap keterbukaan dan kesediaan untuk mengakui dan menghargai kepribadian dan kedaulatan budaya bangsa lain.
- c. menanamkan sikap kritis dan selektif terhadap masuknya kebudayaan asing.

(7) Kerja Sama

Sebagaimana diuraikan dalam butir 6, kontak budaya antar suku dan antar bangsa sulit untuk dihindari. Oleh

karena itu, kerja sama kebudayaan perlu diarahkan agar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu dapat saling mengembangkan dan memperkaya. Bahkan hubungan kebudayaan antarbangsa dapat memberikan dampak positif bagi hubungan diplomatik atau lebih dikenal dengan istilah diplomasi bermatra kebudayaan. Penyelenggaraan kerja sama baik secara bilateral, multilateral dan Regional antara lain telah dilaksanakan dengan kegiatan pertukaran dan pengiriman misi kebudayaan/kesenian, pameran, peragaan, seminar, diskusi dan workshop. Kerja sama bilateral dilakukan dengan mengadakan persetujuan kebudayaan timbal balik, dengan dua cara :

- a. Kerja sama yang dilandasi dengan perjanjian.
- b. Kerja sama yang tidak dilandasi dengan perjanjian dan diadakan atas dasar kebutuhan khusus dengan membuat perjanjian secara khusus untuk setiap kegiatan saja.

Kerja sama Multilateral diselenggarakan dengan berbagai negara yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh badan tertentu, misalnya UNESCO. Sedangkan kerja sama Regional dilakukan dengan negara-negara tetangga se Asia dan Asia Tenggara, seperti : ASEAN Committee on Culture and Information (COCI), Seameo Project in Archeology and Fine Arts (SPAFA), Asian Cultural Centre For Unesco (ACCU) dan sebagainya.

Di samping itu, juga dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi/yayasan/lembaga asing (antara lain : the Japan Foundation, the Ford Foundation) dan dalam negeri baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

V. KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DALAM PJP II.

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan dalam perkembangan dan tuntutan pembangunan dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI. Berbagai kecenderungan masa depan, serta masalah yang akan timbul seiring dengan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara nasional, regional maupun global, membangkitkan tantangan yang harus dijawab dalam pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tantangan, kendala dan peluang serta kebijaksanaan pembangunan kebudayaan dalam PJP II adalah sebagai berikut.

1. Tantangan.

Sejak Pelita IV dunia dilanda oleh arus keterbukaan dalam berbagai aspek kehidupan dan masih akan berlangsung dalam PJP mendatang. Interaksi antar bangsa yang didorong oleh pesatnya kemajuan iptek terutama teknologi komunikasi dan transportasi mengakibatkan derasnya arus informasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing dari luar negeri yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya melalui paket acara televisi dari luar, film, dan bahan bacaan merupakan ancaman bagi pembangunan budaya nasional. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada gilirannya dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya krisis jati diri dan kepribadian bangsa.

Di pihak lain, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai daya tangkal yang handal dan kemampuan untuk memilih dan memilah berbagai pengaruh dari luar sehingga dampak negatif globalisasi senantiasa dapat

dihindari. Dalam kaitan itu, tantangan pertama yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan nasional adalah bagaimana memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mempunyai ketahanan sosial budaya yang tangguh dan handal.

Sementara itu, proses pembangunan belum sepenuhnya mampu mengikis dan menangkal paham kedaerahan yang sempit, sikap feodal dan eksklusif serta individualistik. Derasnya urbanisasi yang mengakibatkan padatnya penduduk di perkotaan antara lain menumbuhkan gejala persaingan yang tidak sehat dan budaya negatif lainnya yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertikaian paham dan perpecahan antar anggota dan kelompok masyarakat. Nilai tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, serta silih asih, asah dan asuh.

Tantangan yang kedua yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah bagaimana meningkatkan dan memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat utama menjalankan pembangunan.

Masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan bangsa adalah masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap kekayaan dan leluhuran nilai seni budaya bangsa. Dewasa ini, bahkan terdapat kecenderungan makin derasnya arus masuk seni budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa kedalam masyarakat. Selain itu, belum meratanya penghargaan terhadap karya cipta seni dan seniman yang mendorong semangat untuk mengembangkan kreativitas seni. Hal itu menyebabkan pula terbatasnya karya seni yang bermutu termasuk karya Sastra besar yang dilahirkan. Dalam pembinaan kesenian ini tantangan yang dihadapi sebagai tantangan ketiga adalah bagaimana menciptakan iklim yang mendorong seluruh masyarakat agar lebih menghargai seni budaya bangsa dan menjaga kelestariannya serta mendorong karya seni baru yang bermutu.

Dalam pada itu, dengan semangat kebangkitan nasional kedua dalam masa PJP II yang pada tingkat global ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan iptek diperlukan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek dengan tetap mengindahkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih terikat oleh nilai-nilai tradisional yang tidak selalu mendukung kesiapan dan kematangan berpikir, bersikap dan bertindak secara terbuka dan maju, menghargai waktu, dan berani bersaing secara sehat. Budaya menulis, membaca, belajar, dan mengakrabkan diri dengan iptek belum tumbuh dengan subur pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, tantangan keempat yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan yang mempunyai daya untuk mengembangkan iptek guna mewujudkan kualitas bangsa yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia.

Penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cermin diri berpikir logis dan sistematis sehingga dapat mendukung upaya menumbuhkan kembangkan iptek. Kenyataan menunjukan bahwa bahasa Indonesia belum sepenuhnya digunakan masyarakat dengan baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga. Menurut sensus penduduk tahun 1990, dari penduduk usia lima tahun ke atas hanya sekitar 15% yang telah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sekitar 17% yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan 68 % yang telah memahami tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada keterbatasan dalam penerjemahan dan penulisan buku ilmiah, baik jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu, tantangan pembangunan kebudayaan yang *Kelima* adalah bagaimana mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek

seiring dengan penulisan dan penerbitan berbagai buku bermutu.

Pembinaan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan telah dapat membina kerukunan antar umat beragama dan antar sesama umat beragama dan antar sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, masih terdapat kesulitan dalam membina para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak bersikap tertutup dan tidak mengarah ke pembentukan agama baru serta sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini juga merupakan tantangan *Keenam* dalam pembangunan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. *Kendala*

Dalam upaya menjawab berbagai tantangan dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI mendatang akan menghadapi berbagai kendala yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pembangunan kebudayaan nasional dan pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat yang dapat mengakibatkan rendahnya daya saring dan daya tangkal terhadap pengaruh budaya asing yang negatif. Dalam pada itu, masyarakat berpendidikan rendah juga mengalami kesulitan untuk menyerap dan mengembangkan nilai-nilai baru yang positif sehingga pada gilirannya dapat menghambat upaya mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia.

Kedua, kurang mantapnya mekanisme penyaringan terhadap penetrasi budaya luar yang negatif, baik melalui siaran televisi maupun media masa lainnya.

Ketiga, masih lemahnya peran keluarga dalam menyemai, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai agama sejak dini, yang antara lain disebabkan oleh terjadinya pergeseran pola hidup dan kurang siapnya masyarakat dalam menghadapi kecendrungan umum transformasi struktural dari masyarakat agraris tradisional ke industri modern.

Keempat, masih cukup banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini akan menjadi lebih sulit, apabila masyarakat yang lebih beruntung tidak mempunyai kepedulian dan kesetiakawanan sosial sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial yang merupakan kendala bahkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelima, sulitnya upaya penggalan, pengkajian, dan pelestarian benda cagar budaya, untuk benda cagar budaya dan situs yang berada di daerah pedalaman yang terpencil.

Keenam, kurangnya tenaga teknis kebudayaan dan perpustakaan baik jumlah maupun mutunya, berikut sarana dan prasarana untuk mengembangkan kebudayaan dan perpustakaan.

Ketujuh, kendala khusus untuk pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masih terdapatnya sikap tertutup untuk memberikan informasi guna keperluan pembinaan.

3. *Peluang*.

Walaupun terdapat beberapa kendala sebagaimana disebutkan di atas, dalam upaya pengembangan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat berbagai peluang sebagai faktor pendukung. Peluang-peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) makin memasyarakatnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta makin mantapnya Wawasan Nusantara sebagai hasil kesiapan penataran P4.

- (2) budaya bangsa yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebinekaan dan keekaan bangsa.
- (3) corak ragam budaya bangsa yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai.
- (4) meningkatnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan yang dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (5) bangsa Indonesia telah berabad-abad memiliki kebudayaan dan daya toleransi yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan untuk menyerap dan mengadaptasi pengaruh budaya asing yang positif.
- (6) makin meluasnya jangkauan penyebaran informasi termasuk pelayanan perpustakaan yang dapat digunakan sebagai wahana penyebarluasan nilai-nilai luhur budaya dan iptek.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebudayaan nasional sesuai dengan arahan GBHN, maka dalam PJP II disusun serangkaian kebijaksanaan yang mengarah pada upaya yang bersifat preservasi dan pengembangan. Kebijakan tersebut meliputi bidang-bidang: (1) pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya; (2) pembinaan kebahasaan, kesastraan, dan kepustakaan; (3) pembinaan kesenian; (4) pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman; dan (5) pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut disajikan uraian mengenai masing-masing bidang.

(1) Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

Upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa terus ditingkatkan dalam rangka

memperkokuh jati diri dan kepribadian bangsa antara lain melalui identifikasi peranan budaya sebagai pembentuk jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya yang melandasi kreativitas, peradaban, budi pekerti, dan akhlak mulia, tata krama, disiplin nasional, serta tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, terus ditingkatkan upaya pembentukan masyarakat yang mempunyai sikap menghargai waktu, disiplin dan etos kerja produktif, maupun kerja keras, dan berfikir kreatif melalui pendidikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Upaya memperkaya pengetahuan budaya peserta didik terutama pada tingkat pendidikan dasar dilakukan melalui pengkajian dan penerapan materi bahan pengajaran disertai dengan pengadaan buku pegangan bagi guru dan bahan bacaan untuk peserta didik yang bersumber pada adat istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Penyebarluasan informasi kebudayaan yang didukung dengan suatu sistem pengolahan informasi yang handal terus dilakukan sehingga mampu menyediakan informasi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga setiap saat dapat memberikan layanan informasi kebudayaan untuk berbagai kepentingan nasional, regional dan internasional. Dalam penyebaran informasi kebudayaan tersebut juga dikembangkan komunikasi pemikiran budaya yang diarahkan untuk mempersiapkan pengembangan suatu masyarakat industri bagi warga negara Indonesia. Dalam hal itu, peran lembaga komunikasi baik pemerintah maupun masyarakat terus didorong dan ditingkatkan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam memelihara dan mengembangkan peradaban bangsa sebagai pembentuk jati diri bangsa.

Kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun swasta secara nasional, regional, dan internasional ditingkatkan terutama untuk meningkatkan citra budaya bangsa yang luhur dengan meningkatkan fungsi berbagai kekayaan budaya bangsa untuk mendukung pembangunan.

Berbagai upaya yang dilakukan melalui segenap bidang kehidupan dalam rangka memperluas cakrawala dan aspirasi budaya bangsa dan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa terus dibina dan dipacu ke arah yang positif dan dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta tanggungjawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan terus diarahkan untuk mencegah dan menghilangkan melebarnya kesenjangan ekonomi dan sikap eksklusif serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

(2) *Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan dan Kepustakaan*

Bahasa Indonesia sebagai pembentuk jati diri bangsa, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa nasional yang merupakan sarana komunikasi serta sarana pengembangan iptek dibina dan dikembangkan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar di berbagai lapisan masyarakat dan instansi baik pemerintah maupun swasta. Di samping itu, penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari pengetahuan budaya dilestarikan guna memperkaya khasanah budaya bangsa. Sehubungan dengan itu, diupayakan pengembangan mata ajaran bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia sebagai salah satu sumber kekayaan batin bangsa dalam rangka meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai budaya luhur lama dan baru demi pengembangan kebudayaan nasional terus ditingkatkan. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah ditingkatkan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur

jati diri dan kepribadian bangsa. Dalam rangka itu, didorong dan ditingkatkan peranan tenaga ahli dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Kemampuan penguasaan bahasa asing sebagai wahana penyerapan dan penguasaan iptek serta untuk memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan ditingkatkan melalui jalur sekolah dan luar sekolah. Dampak negatif penggunaan bahasa asing terhadap pembinaan bahasa Indonesia dihindari antara lain dengan cara menghindarkan pemakaian kata ataupun istilah asing yang telah mempunyai padanan bahasa Indonesia dan menertibkan pemakaian bahasa asing agar sesuai dengan tempat dan kebutuhan.

Kesempatan membaca buku bagi masyarakat diperluas sehingga mendukung upaya mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat yang makin berbudaya tinggi, maju, dan mandiri. Sehubungan dengan itu, kepustakaan dan perpustakaan terus ditingkatkan agar lebih merata dan bermutu dan menjangkau segenap lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan. Upaya meningkatkan mutu perpustakaan dilakukan untuk semua jenis perpustakaan antara lain dengan meningkatkan jumlah dan mutu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antar perpustakaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan perpustakaan. Selain itu, diversifikasi fungsi perpustakaan dikembangkan dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreatifitas.

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di atas, maka penerjemahan berbagai buku kebudayaan dan iptek berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia serta penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ditingkatkan guna meningkatkan wawasan budaya dan penguasaan iptek serta memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada negara lain.

(3) *Pembinaan Kesenian*

Pembinaan kesenian diarahkan pada upaya menumbuhkan daya cipta kreatif yang dapat memperkaya khasanah kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, meningkatkan kebanggaan nasional, mengungkapkan kehalusan perasaan dan keindahan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesenian daerah terutama yang hampir punah dibina dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan kesenian masa kini diarahkan agar berakar kuat pada budaya luhur bangsa.

Pendidikan kesenian sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional serta pendidikan kesenian untuk tujuan profesional dilakukan melalui pendidikan sekolah, pameran dan pementasan karya-karya seni dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan kreatif. Peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam membina dan mengembangkan kesenian didorong dan ditingkatkan.

Dalam pada itu, pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kesenian yang tumbuh di masyarakat ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan karya seni bermutu dalam rangka memperkaya budaya bangsa.

Upaya meningkatkan citra kesenian Indonesia sebagai penunjang program keparawisataan dan diplomasi bermatra kebudayaan dilakukan antara lain melalui penyebarluasan informasi kesenian ke luar negeri dan tukar menukar misi kesenian dengan negara lain.

(4) *Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman*

Upaya melestarikan dan melindungi berbagai bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai kekayaan

budaya dan kebanggaan nasional ditingkatkan antara lain melalui pengamalan dan perlindungan benda cagar budaya dari kemungkinan pengrusakan, pencurian, penyelundupan dan perdagangan benda tersebut. Untuk itu, kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri terus dikembangkan.

Fungsi dan peranan museum dikembangkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda peninggalan sajarah dan kepurbakalaan, tetapi juga sebagai wahana penelitian dan pendidikan budaya serta pengenalan dan pemahaman mengenai jati diri bangsa terutama bagi generasi muda. Museum IPTEK juga dikembangkan dalam rangka penanaman dan pengembangan budaya iptek sejak dini.

Guna mengembangkan jiwa kejuangan, kebanggaan nasional dan semangat cinta tanah air serta kesadaran sejarah dilakukan perekaman, penulisan, dan penyebarluasan peristiwa perjuangan dalam sejarah dan biografi para tokoh sejarah serta penulisan bahan ajaran sejarah yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan untuk keperluan pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah.

(5) Pembinaan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berlangsung menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemeliharaan kerukunan antar dan antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif

penganut akan tanggungjawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila .

VI. PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM REPELITA VI

Dalam Repelita VI, Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai program-program sebagai berikut.

1. Program pokok

a. *Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya.*

Program ini bertujuan untuk mengungkapkan, menanamkan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Lingkup kegiatan yang akan dilakukan meliputi: antara lain usaha-usaha inventarisasi, penelitian, pengkajian dan pengungkapan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kegiatan penelitian kebudayaan daerah yang akan dilakukan meliputi antara lain tatakrama, disiplin, adat istiadat dan nilai-nilai budaya dalam rakyat, permainan rakyat, dan norma sosial serta pandangan masyarakat. Hasil dari kegiatan tersebut akan dimanfaatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, antara lain, melalui media massa dan pranata sosial yang hidup di masyarakat dan lembaga pendidikan.

Dalam upaya mengembangkan kebudayaan masa kini akan dilakukan pelayanan informasi kepada masyarakat luas melalui pameran dan peragaan budaya serta penelitian dampak kebudayaan masa kini terhadap anak, remaja, pemuda, wanita, dan kehidupan keluarga. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan pengembangan nilai-nilai budaya yang mendukung produktivitas, efisiensi dan etos kerja produktif dan pengembangan iptek dilakukan pembelajaran dan pengkajian budaya tentang pengembangan jati diri dan kepribadian bangsa, lomba dan sayembara penulisan naskah dalam bidang kebudayaan serta festival kebudayaan bagi para remaja,

pemuda, dan masyarakat luas. Selain itu, akan dikembangkan sistem informasi kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka merangsang kreativitas para budayawan dikembangkan iklim dan kondisi yang mendukung, antara lain dengan diadakannya dialog budaya secara berkala dan memberikan penghargaan kepada budayawan yang kreatif dan mampu menghasilkan karya budaya bermutu. Peran serta dunia usaha dalam hal ini didorong dan ditingkatkan.

b. Program Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan dan Kepustakaan.

(1) Pembinaan dan Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan.

Program ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dalam upaya membina bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern yang dapat berperan sebagai sarana komunikasi nasional dan wahana pengembangan iptek. Program itu meliputi penelitian berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah, serta penelitian dan pengembangan sistem pengajaran bahasa dan sastra nasional, sastra daerah, dan sastra asing.

Upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan melalui pembakuan kebahasaan, penyempurnaan tata bahasa baku bahasa Indonesia, penyempurnaan dan penyusunan kamus, antara lain kamus iptek dan kamus bahasa daerah, bimbingan dan penyuluhan, serta pemberian penghargaan bagi karya bahasa dan sastra yang bermutu. Penulisan dan penerjemahan berbagai buku bahasa, sastra dan iptek yang bermutu akan dilakukan dalam upaya mempercepat alih iptek dan memperkaya bahasa nasional, kesastraan dan pustaka Indonesia.

Bahasa dan sastra daerah akan dibina dan dikembangkan, antara lain, melalui pemetaan dan pelestarian bahasa daerah, peningkatan penghayatan dan penghargaan masyarakat terhadap karya sastra daerah, penyusunan naskah dan pengadaan buku bacaan sastra untuk anak dan remaja yang mengandung nilai-nilai budaya dan sastra daerah dan nusantara, lomba kesastraan bagi remaja, pemuda dan masyarakat luas, dan pemberian penghargaan karya sastra yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan penguasaan bahasa asing melalui jalur sekolah dan luar sekolah diupayakan penyediaan bahan tambahan untuk tenaga pendidik bahasa asing. Upaya mengurangi pengaruh negatif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia akan dilakukan melalui penertiban pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan berbagai media masa.

(2) Pimbinan Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca dan minat belajar masyarakat. Dalam Repelita VI kegiatan yang dilakukan adalah memantapkan mutu pelayanan sistem nasional perpustakaan sehingga makin mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. Di samping itu, ditingkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan melalui jaringan kerja sama lembaga perpustakaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pengembangan fungsi dan peran perpustakaan dilakukan terutama untuk mengembangkan minat belajar anak-anak dan remaja.

c. Program Pembinaan Kesenian

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan daya cipta anggota masyarakat, khususnya para seniman, memperluas apresiasi seni masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk

berpartisipasi dan menikmati seni budaya bangsa. Untuk itu, akan dilakukan kerja sama pembinaan dan diupayakan pemberian bantuan kepada organisasi kesenian serta penghargaan kepada seniman.

Pembinaan kesenian didukung oleh kegiatan penggalan, pengolahan, pendokumentasian, perekaman, dan penelitian kesenian dalam rangka melestarikan, memelihara, dan mengembangkan kesenian daerah dan kesenian nasional. Untuk itu, dilakukan kegiatan operasi dan perawatan fasilitas taman-taman budaya guna meningkatkan dayaguna dan hasil gunanya. Sementara itu, dalam rangka peningkatan mutu diberikan bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan, dan temu seniman.

Selain itu dilakukan pula upaya peningkatan prestasi budaya di forum internasional.

d. Program Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman.

(1) Pengkajian dan Penanaman Kesadaran Sejarah

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya pembinaan kebudayaan nasional yang berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai kesejarahan yang tetap mempunyai dinamika yang tinggi. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi penelitian sejarah untuk mengungkapkan sejarah bangsa, pemikiran, dan keteladanan para tokoh masyarakat dan sejarah.

Penelitian kesejarahan bertujuan untuk merekam dan menjernihkan masalah kesejarahan yang hidup dalam masyarakat dan antara lain dilakukan melalui pengungkapan nilai-nilai tradisi sejarah untuk memupuk kebanggaan nasional serta menghidupkan keteladanan para tokoh sejarah nasional. Dalam upaya mendukung pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat dilakukan antara lain inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional dan daerah.

Mengingat bahan pelajaran sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah sangat terbatas mengenai kawasan timur Indonesia, dilakukan penelitian sejarah khusus untuk kawasan tersebut.

(2) Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan

Program ini ditujukan untuk melestarikan dan memanfaatkan bukti-bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan untuk menunjang program pendidikan guna mempertinggi rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional serta memperkaya budaya bangsa dan mendukung kegiatan pariwisata.

Dalam upaya melindungi dan memelihara objek peninggalan sejarah dan purbakala dilakukan berbagai studi kelayakan, studi teknis, rehabilitasi, dan pemugaran terhadap bangunan di situs sejarah dan purbakala seperti di kompleks percandian, masjid, gereja, pura, makam kuno, dan rumah adat.

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengolahan benda cagar budaya diberikan bimbingan, penyuluhan, ceramah, dan penyebaran informasi melalui media masa cetak dan elektronik.

Dalam upaya menggali dan menyelamatkan benda cagar budaya bawah air sebagai sumber daya budaya dan mata rantai sejarah yang sangat penting untuk memahami sejarah kemaritiman Indonesia, akan dilakukan penelitian dan pengkajian serta upaya pengamanannya.

(3) Pembinaan Permuseuman

Pembinaan permuseuman bertujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi museum sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan rekreasi edukatif yang mendukung peningkatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional, keparawisataan, dan penanaman budaya iptek sejak usia dini. Kegiatan yang akan

dilakukan meliputi antara lain pemantapan sistem permuseuman dan pemasyarakatan peraturan tentang permuseuman, pelestarian dan pengembangan benda budaya, pengembangan museum nasional sebagai pusat studi warisan budaya dan pusat informasi sejarah agar mampu menjadi museum bertaraf internasional, serta perintisan pengembangan museum iptek untuk mengembangkan budaya iptek sejak dini. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan pula kegiatan operasi dan perawatan untuk fasilitas museum-museum propinsi.

(4) Penelitian Arkeologi

Penelitian arkeologi bertujuan untuk mengungkapkan data kepurbakalaan, menyelamatkan peninggalan budaya masa lampau sebagai dasar bagi upaya membuka cakrawala wawasan budaya bangsa. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi kegiatan penelitian arkeologi dan publikasi hasil-hasil penelitian.

e. Program Pembinaan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Program ini bertujuan untuk membina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kehidupan kerukunan antar penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah inventarisasi dan dokumentasi ajaran-ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keimanan dan ketaqwaan dan kerukunan para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Program Penunjang

a. Program Pembinaan Anak dan Remaja

Program pembinaan anak dan remaja ditujukan

untuk mempersiapkan anak dan remaja agar mengenal, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur budaya bangsa sejak usia dini guna memperkuat kepribadiannya. Program ini dilaksanakan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah termasuk pendidikan dalam keluarga dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan antara lain dalam keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa penyebaran cerita rakyat, peragaan budaya daerah, dan permainan rakyat yang sesuai dengan perkembangan anak dan remaja, serta bimbingan dan penyuluhan bagi keluarga dan masyarakat.

b. Program Pembinaan Pemuda

Program pembinaan pemuda bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi kader pimpinan bangsa yang tangguh, ulet, dan mandiri dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara serta mempunyai ketahanan budaya yang andal. Untuk itu, dilakukan kegiatan meningkatkan etos kerja, kemauan, dan kesadaran memperkuat mental kejuangan dan kepeloporan serta kepatriotan, mendorong aktivitas dan kreativitas pemuda, menumbuhkan kembangkan kesetiakawanan sosial, budaya gemar membaca dan rasa hormat terhadap generasi terdahulu, serta meningkatkan apresiasi dan sikap pemuda terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Untuk itu, dilakukan bimbingan, penyuluhan, ceramah, lomba, sayembara, pameran, dan peragaan budaya.

c. Program Peranan Wanita

Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri wanita Indonesia sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui berbagai kegiatan pendidikan

kebudayaan baik di sekolah, di luar sekolah, maupun melalui media masa.

d. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Kebudayaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan baik teknis maupun administratif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kebudayaan, serta meningkatkan wawasan budaya masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain mencakup pelatihan tenaga teknis kebudayaan dan perencanaan pengembangan sumber daya kebudayaan secara terpadu, serta penyuluhan kepada masyarakat, termasuk penyuluhan tentang perundang-undangan kebudayaan, seperti undang-undang nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

VII. RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA VI

Program-program pembangunan tersebut di atas dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Dalam program-program tersebut, yang merupakan program dalam bidang kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dibiayai dengan anggaran pembangunan selama Repelita VI (1994/95-1998/99) adalah sebesar Rp. 338.460,0 juta. Rencana anggaran pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk tahun pertama dan selama Repelita VI menurut sektor, sub sektor dan program dalam sistem APBN dapat dilihat dalam Tabel.

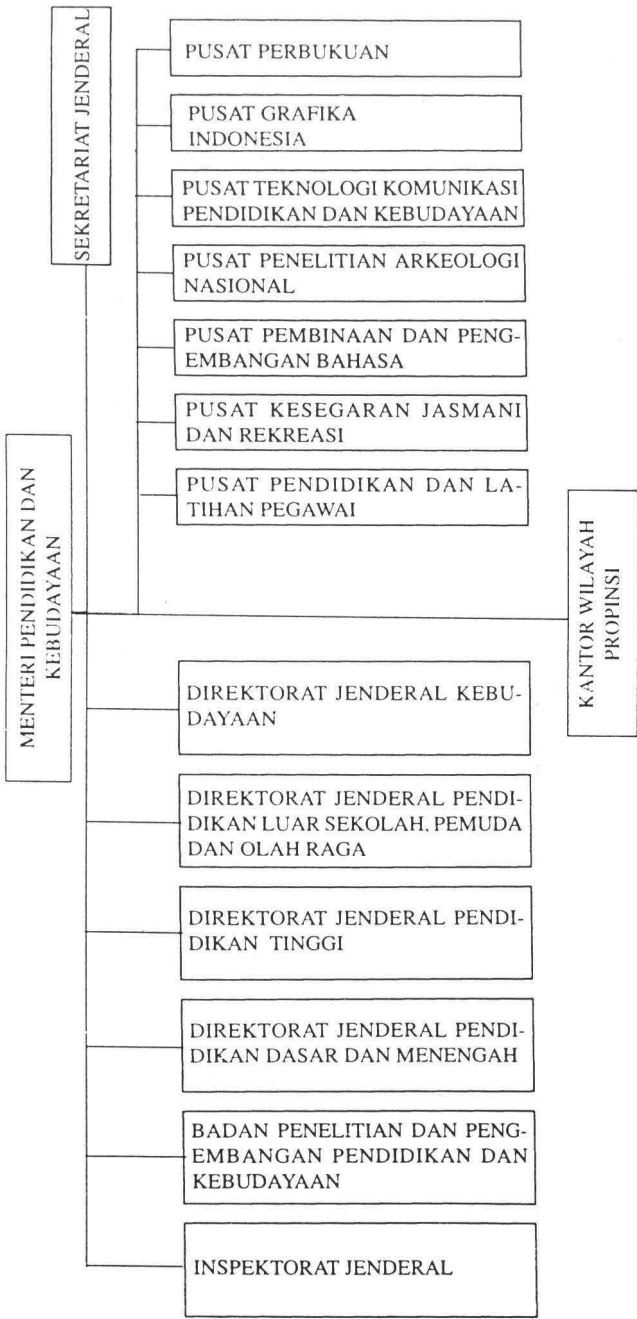
**RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DALAM REPELITA VI**

(dalam juta rupiah)

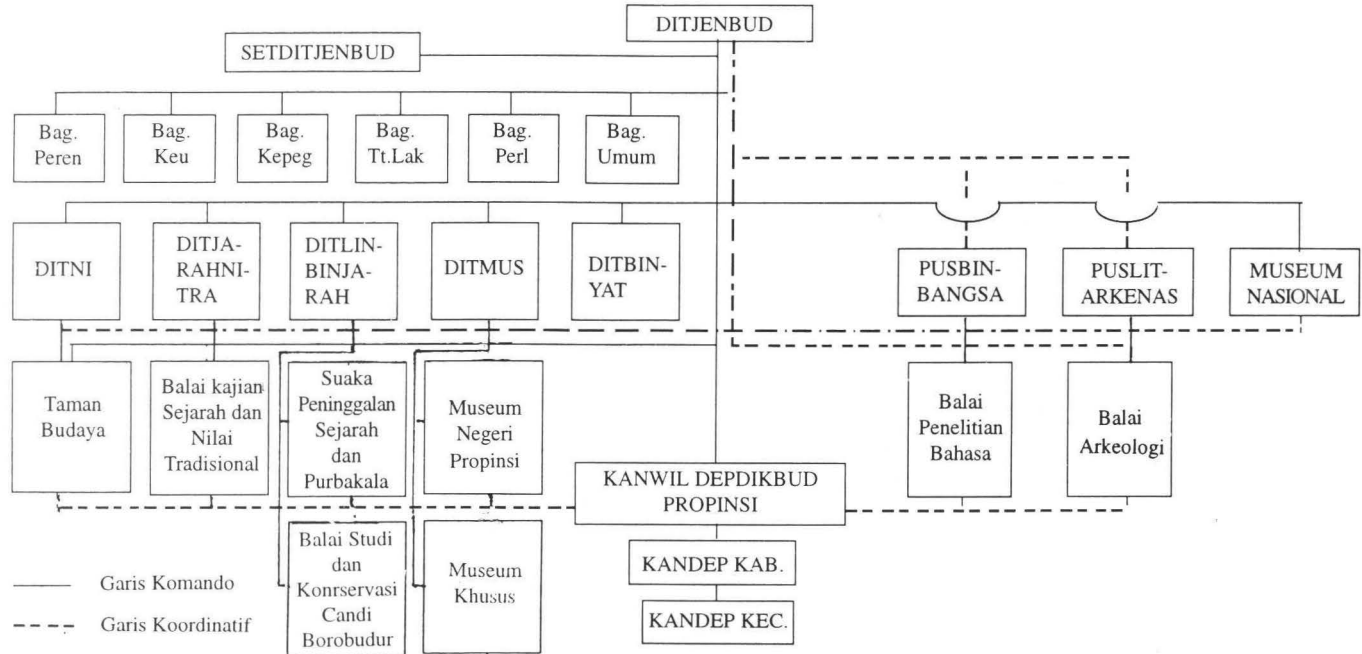
a. Rencana Anggaran Pembangunan

	Sektor/Sub Sektor/Program	1994/95 – 1998/99
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
11.3	Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	338.460,0
11.3.01	Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya	44.330,0
11.3.02	Program Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan dan Kepustakaan	82.000,0
11.3.03	Program Pembinaan Kesenian	67.500,0
11.3.04	Program Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman	142.160,0
11.3.05	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.500,0
	Program OPF Kebudayaan	15.250,0
	Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan	11.500,0
	Program Sistim Informasi Kebudayaan	7.300,0
	Program Pembinaan Anak dan Remaja	3.000,0

b. Struktur Organisasi



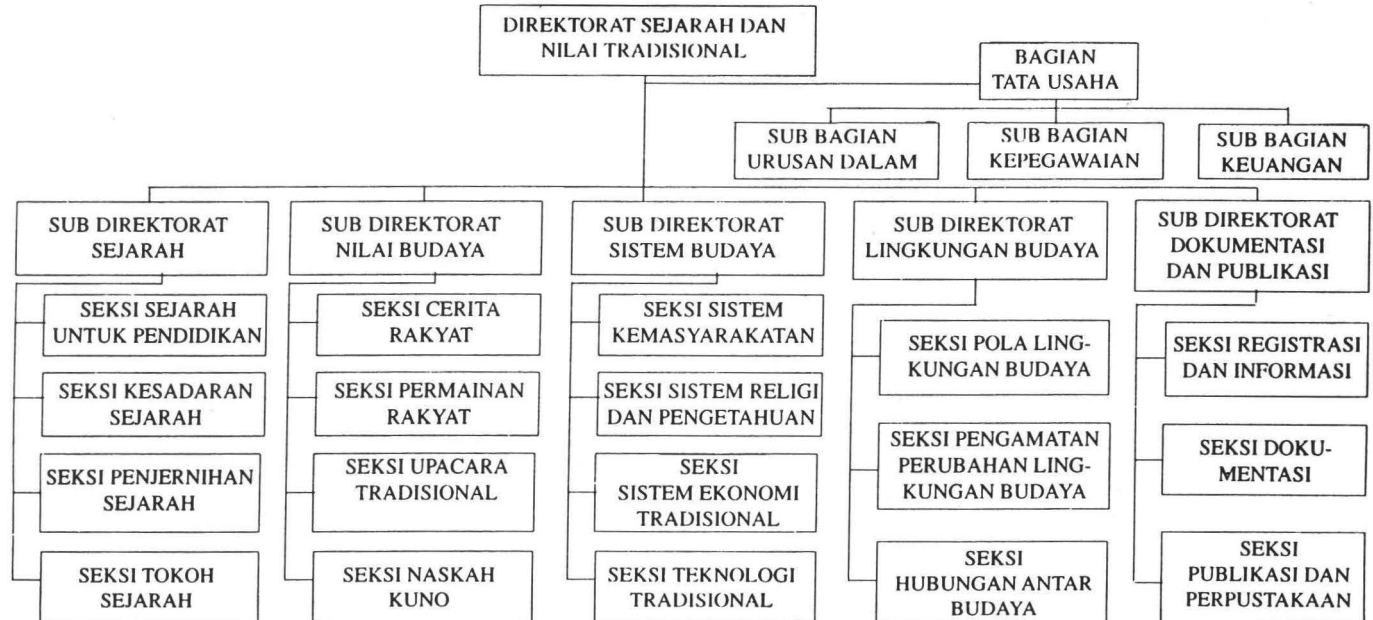
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KESENIAN



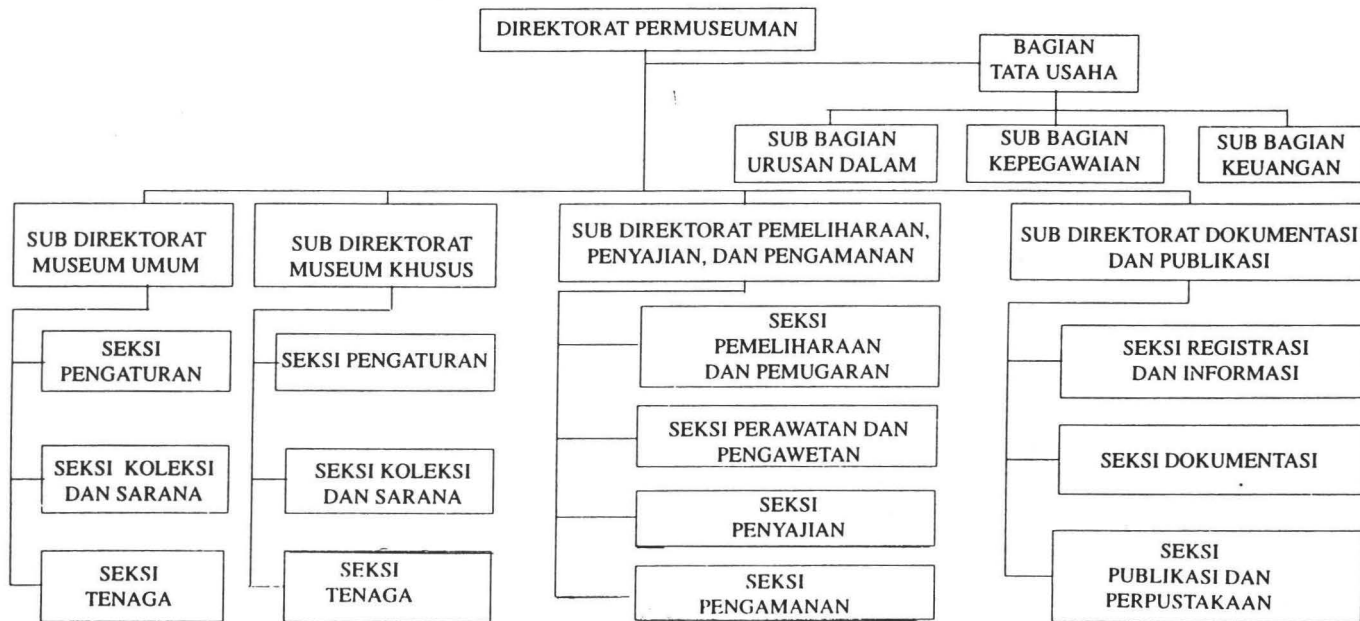
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL



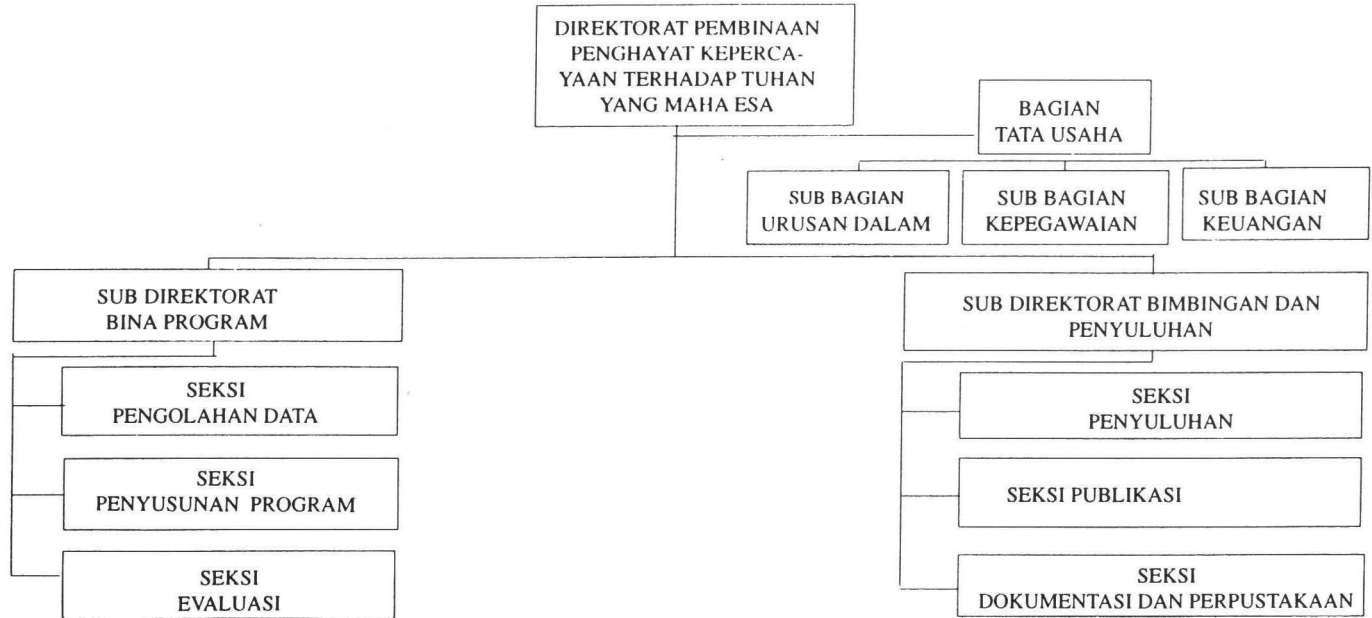
BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

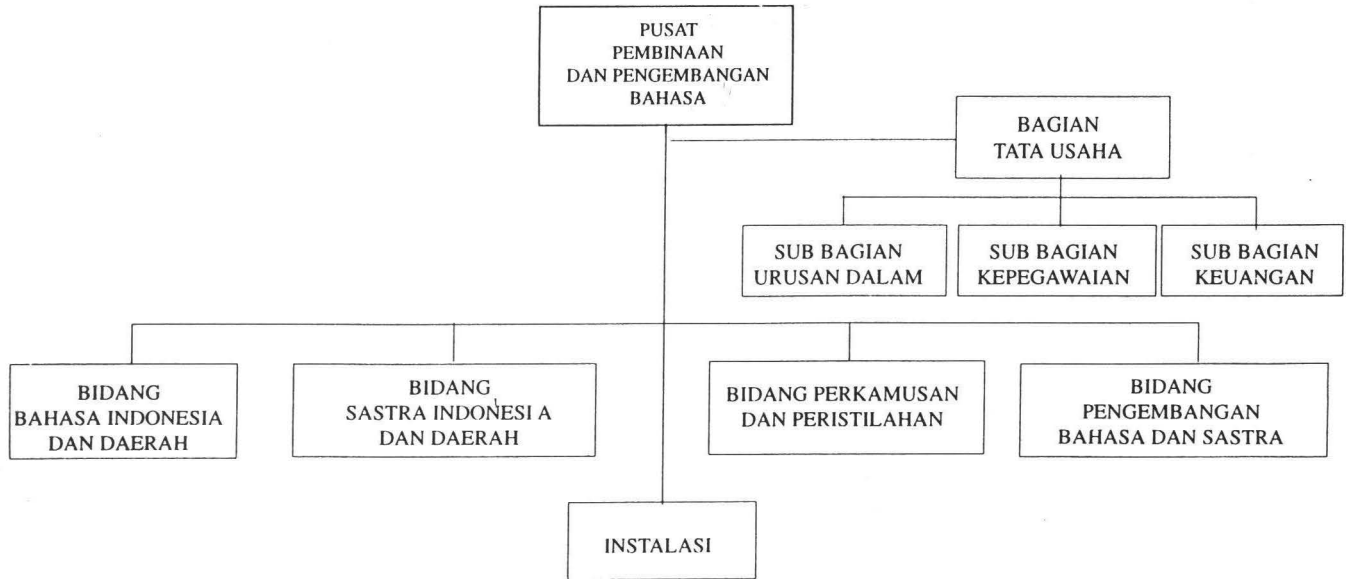


BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERMUSEUMAN

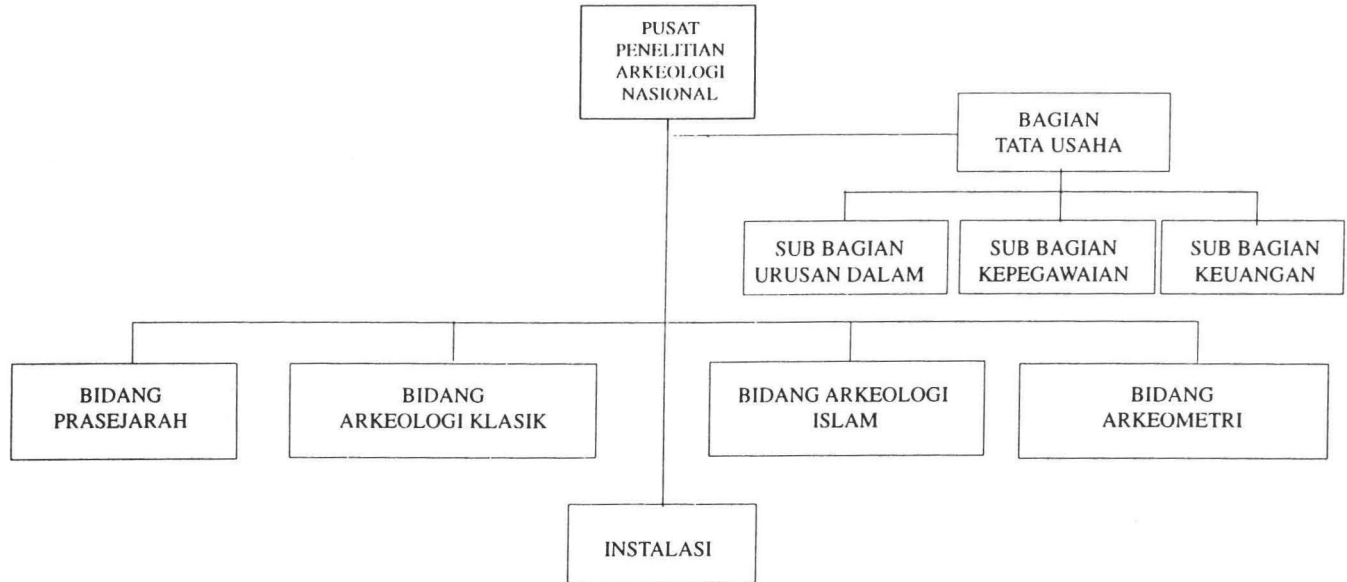


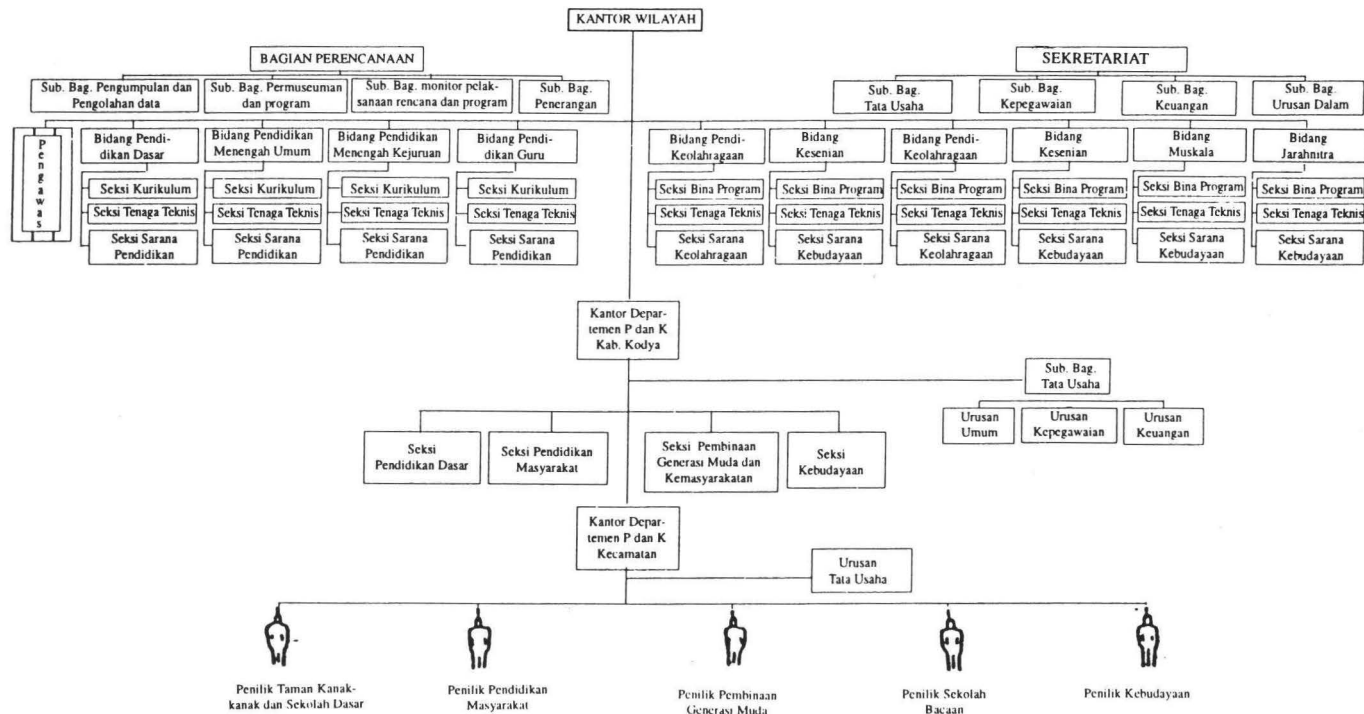
**BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**



BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

BAGAN ORGANISASI PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL







III.3

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM